

Masyarakat Sipil Global dan Boikot: Menentang Impunitas dalam Tatanan Internasional

Inggrid Galuh Mustikawati, MHSPS¹

Faculty of Social Science and Political Science, Islamic State University Syarif
Hidayatullah Jakarta

Evan Andhika Suci²

Faculty of Social Science and Political Science, Islamic State University Syarif
Hidayatullah Jakarta

Fauzan Muhammad Khoir³

Faculty of Social Science and Political Science, Islamic State University Syarif
Hidayatullah Jakarta

e-mail: ¹inggrid.galuh@staff.uinjkt.ac.id

²evan.andhika.suci.eas@gmail.com

³fauzanmuhammadkhoir@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the global boycott movement against Israel as a form of transnational civil resistance from the lens of critical international relations, particularly postcolonial and normative approaches. The study highlights how cultural practices—such as Palestinian songs, embroidery (tatreez), and collective memory—have historically functioned as symbolic resistance to colonial domination, later evolving into structured strategies such as economic boycotts. By focusing on the Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement initiated in 2005, this paper argues that boycott represents not merely a moral gesture but a political instrument of global civil society that challenges systemic impunity, double standards, and epistemic colonialism within the international order. Through analysis of economic impacts on multinational corporations, the role of transnational networks, and the circulation of counter-narratives in digital media, the article demonstrates the capacity of non-state actors to exercise normative power in addressing human rights violations and potential genocide when formal international institutions fail to act. This study contributes to critical debates in international relations by foregrounding boycott as both an ethical and political practice of resistance, underscoring the transformative role of global solidarity in confronting structural injustice.

Keywords: *Boycott, BDS Movement, Palestine, Critical International Relations, Postcolonialism, Global Civil Society*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji gerakan boikot global terhadap Israel sebagai bentuk perlawanan sipil transnasional melalui lensa hubungan internasional kritis, khususnya pendekatan poskolonial dan normatif. Studi ini menyoroti bagaimana praktik budaya — seperti lagu-lagu Palestina, sulaman (*tatreez*), dan ingatan kolektif — secara historis berfungsi sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi kolonial, yang kemudian berkembang menjadi strategi terstruktur seperti boikot ekonomi. Dengan berfokus pada gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) yang dimulai pada tahun 2005, tulisan ini berargumen bahwa boikot bukan sekadar gestur moral, melainkan instrumen politik masyarakat sipil global yang menantang impunitas sistemik, standar ganda, dan kolonialisme epistemik dalam tatanan internasional. Melalui analisis terhadap dampak ekonomi pada perusahaan multinasional, peran jaringan transnasional, serta sirkulasi narasi tandingan di media digital, artikel ini menunjukkan kapasitas aktor non-negara untuk menjalankan kekuatan normatif dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia dan potensi genosida ketika lembaga internasional formal gagal bertindak. Studi ini memberikan kontribusi pada perdebatan kritis dalam hubungan internasional dengan menempatkan boikot sebagai praktik etis sekaligus politis dari perlawanan, serta menegaskan peran transformatif solidaritas global dalam menghadapi ketidakadilan struktural.

Kata kunci: boikot, gerakan BDS, Palestina, hubungan internasional kritis, poskolonialisme, masyarakat sipil global.

1. PENDAHULUAN

Era digital telah melahirkan bentuk solidaritas transnasional yang lebih mendalam. Media sosial menjadi saluran utama dalam menyebarkan dukungan terhadap Palestina, terutama setelah agresi Israel di Gaza pada tahun 2023. Salah satu fenomena yang mencolok adalah penyebaran simbol semangka di Instagram dan Facebook, yang berfungsi sebagai strategi melawan sensor algoritmik serta sebagai saluran distribusi bagi kampanye Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS). Aktivisme digital ini menunjukkan bahwa solidaritas antarnegara kini tidak hanya diwujudkan melalui diplomasi resmi, tetapi juga melalui praktik akar rumput yang mampu menjangkau komunitas global.

Fenomena ini terjadi di tengah stagnasi lembaga-lembaga internasional resmi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menegakkan hukum internasional terkait konflik Israel-Palestina. Meskipun telah ada berbagai resolusi PBB dan penyelidikan atas pelanggaran hak asasi manusia, pelaksanaan sanksi atau tindakan tegas sering kali terhambat oleh hak veto negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat. Situasi ini menunjukkan tren politik global yang justru melemahkan otoritas lembaga internasional dalam menegakkan akuntabilitas. Dalam kekosongan inilah, gerakan boikot muncul sebagai strategi alternatif yang digerakkan oleh masyarakat sipil untuk menekan negara dan perusahaan yang dianggap berkolusi dengan pendudukan Israel.

Kondisi ini mencerminkan adanya imunitas sistemik dalam politik internasional. Standar ganda terlihat jelas, misalnya ketika agresi Rusia terhadap Ukraina segera disambut dengan sanksi berat, sementara pelanggaran serupa oleh Israel cenderung diabaikan. Kontras ini menyoroti keberlanjutan akuntabilitas selektif dalam politik global. Meskipun hukum internasional secara normatif berlaku bagi semua negara, dalam praktiknya penegakan hukum tersebut dibentuk oleh kepentingan geopolitik dan distribusi kekuasaan di dalam lembaga-lembaga internasional. Perbandingan berikut menggambarkan bagaimana pola pelanggaran yang serupa dapat menghasilkan konsekuensi institusional dan politik yang sangat berbeda.

Tabel 1. Standar Ganda dalam Akuntabilitas Internasional

No	Kasus	Jenis Kekerasan	Respon Global	Sikap Institusi	Pencapaian
1	Perang Saudi Arabia-Yemen (2015-sekarang)	Pengeboman warga sipil, krisis kemanusiaan	Sanksi minimal meskipun ada temuan PBB	UNSC sebagian besar diam karena perlindungan Inggris/AS	Perang yang berkelanjutan, tidak ada akuntabilitas
2	Russia-Ukraine (2022)	Agresi Militer	Sanksi dari Uni Eropa,	ICC membuka	Isolasi internasional

			AS, kecamatan PBB	penyelidikan, resolusi UNGA disahkan	yang cepat
3	Israel-Palestina (1948/2023-sekarang)	Agresi militer & pendudukan	Kecaman terbatas, dukungan Barat untuk Israel	ICC terhenti, DK PBB diveto oleh AS	Tidak ada sanksi, pendudukan yang berkelanjutan

Sumber: Kompilasi penulis berdasarkan UN News (2023), Al Jazeera English (2023), Brehony (2020), dan Siaran Pers ICC (2023).

Asimetri yang ditunjukkan di atas memperlihatkan bahwa otoritas hukum internasional pada akhirnya tunduk pada kepentingan politik. Dalam ketiadaan penegakan hukum yang konsisten, tanggung jawab atas akuntabilitas secara bertahap telah bergeser dari institusi formal menuju jaringan transnasional yang bersifat informal. Morrison (2020) menegaskan bahwa BDS mampu bertahan karena ia beroperasi lintas batas, dengan mengaitkan isu Palestina ke dalam konteks keadilan global, hak asasi manusia, dan tanggung jawab korporasi. Dengan kata lain, solidaritas digital transnasional muncul sebagai respons terhadap lemahnya institusi formal yang cenderung bias dan tidak konsisten dalam penerapan hukum internasional.

Meskipun semakin terlihat menonjol, politik boikot masih kurang dieksplorasi dalam literatur utama hubungan internasional, yang cenderung memusatkan perhatian pada diplomasi antarnegara, konflik bersenjata, atau kerangka institusional. Namun, sejumlah studi terbaru menunjukkan bahwa boikot tidak hanya berfungsi sebagai instrumen tekanan ekonomi, tetapi juga sebagai tindakan simbolik dari perlawanan global yang mampu membentuk wacana publik serta memengaruhi perilaku korporasi dan pemerintah (Citra et al., 2025). Berangkat dari celah kajian tersebut, penelitian ini berupaya memahami boikot sebagai praktik politik transnasional yang memperlihatkan bagaimana masyarakat sipil global merebut kembali agensi moral dan politiknya di era digital. Hal ini sekaligus menimbulkan pertanyaan yang lebih luas mengenai bagaimana aktor non-negara, melalui bentuk perlawanan digital dan kultural, mendefinisikan ulang gagasan tentang legitimasi dan keadilan di luar institusi formal.

Ketegangan antara klaim moral universal dan penerapan hukum yang selektif memunculkan pertanyaan penting tentang peran masyarakat sipil global dalam menantang struktur dominan dari tatanan internasional. Dalam konteks ini, artikel ini berfokus pada gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS)* sebagai contoh bagaimana bentuk perlawanan sipil transnasional dapat menggabungkan ekspresi kultural dan tindakan politik. Pertanyaan utama yang menjadi panduan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana gerakan BDS bertindak sebagai praktik politik transnasional melalui mana masyarakat sipil global menantang impunitas sistemik dan standar ganda dalam tatanan internasional?

Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan memperluas pemahaman tentang agensi politik dalam hubungan internasional di luar pendekatan yang berpusat pada negara, serta menunjukkan bagaimana aktor non-negara memanfaatkan instrumen etis dan kultural untuk membentuk norma global dan menggugat struktur kekuasaan yang timpang dalam dunia pascakolonial.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini berangkat dari konsep *Global Civil Society* (masyarakat sipil global), yang dipahami sebagai ruang di luar negara dan pasar, di mana aktor-aktor non-negara—seperti LSM, gerakan sosial, dan individu—berinteraksi lintas batas untuk memengaruhi norma serta kebijakan global. Kemunculan ruang ini didorong oleh proses globalisasi dan gelombang ketiga demokratisasi, yang membuka ruang baru bagi aktivisme transnasional. Keck dan Sikkink (1998) menggambarkan fenomena ini melalui pola *boomerang*, yaitu ketika aktor domestik yang menghadapi resistensi dari negara dapat menjangkau sekutu transnasional untuk menciptakan tekanan eksternal. Demikian pula, Tarrow (2005) menjelaskan bagaimana jaringan aktivis memobilisasi politik perlawanan untuk mendorong perubahan dalam norma-norma internasional. Pandangan-pandangan ini membantu menempatkan gerakan seperti *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) sebagai bagian dari upaya masyarakat sipil transnasional yang lebih luas dalam menghubungkan perjuangan lokal dengan advokasi global.

Namun, diskusi arus utama mengenai masyarakat sipil global sering kali merefleksikan perspektif Barat-sentris, dengan fokus utama pada LSM formal dan dampak yang dapat diukur, sambil mengabaikan bentuk-bentuk perlawanan alternatif yang muncul dari *Global South*. Di sinilah pendekatan *Postcolonial* menjadi relevan. Pendekatan ini menantang dominasi kerangka berpikir Barat yang membentuk cara pengetahuan dan legitimasi diproduksi dalam hubungan internasional. Konsep *epistemic colonialism* (kolonialisme pengetahuan) mengungkap bagaimana narasi Barat telah membingkai isu Palestina semata-mata sebagai konflik teritorial, bukan sebagai bentuk kolonialisme pemukim (*settler colonialism*). Dari perspektif ini, BDS dapat dipahami sebagai upaya untuk merebut kembali narasi dan melawan representasi kolonial melalui cara-cara kolektif dan non-kekerasan.

Untuk melengkapi pandangan kritis ini, pendekatan *Normative*—khususnya teori *Norm Life Cycle* dari Finnemore dan Sikkink (1998)—menawarkan cara untuk menelusuri bagaimana ide dan prinsip moral bergerak dari aktivisme akar rumput menuju penerimaan internasional. Dalam kerangka ini, gerakan seperti BDS berperan sebagai *norm entrepreneurs*, yang menyebarkan norma-norma hak asasi manusia dan anti-pendudukan melalui jaringan advokasi transnasional. Gerakan-gerakan ini menunjukkan bagaimana argumen moral dan aksi simbolik dapat membentuk kembali pemahaman global tentang keadilan dan legitimasi.

Pengalaman gerakan boikot sebelumnya—terutama perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan—menyediakan paralel historis yang penting. Pengalaman tersebut menunjukkan bagaimana tekanan moral dan isolasi ekonomi secara bertahap dapat memengaruhi perilaku negara. Namun, literatur yang ada tentang gerakan boikot masih cenderung menilai keberhasilan hanya melalui indikator ekonomi—seperti penurunan investasi atau kerugian perdagangan—sementara perubahan budaya, pembentukan identitas, dan pengaruh moral

justru sering kali menjadi penggerak utama transformasi jangka panjang.

2.1 Analisis Kesenjangan

Kesenjangan utama dalam literatur yang ada terletak pada keterbatasan dalam menghubungkan bentuk-bentuk historis perlawanan kultural dengan aktivisme transnasional modern. Studi tentang masyarakat sipil global cenderung menekankan model organisasi Barat dan dampak yang terukur, sementara penelitian postkolonial sering kali tetap bersifat diskursif dan kurang terhubung dengan analisis difusi norma. Akibatnya, interaksi antara praktik perlawanan yang berakar kuat—seperti *sumud* (keteguhan) dalam konteks Palestina—dan mekanisme penyebaran norma global masih kurang dieksplorasi.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memandang BDS sebagai sintesis antara aktivisme postkolonial dan normatif. Melalui perspektif ini, BDS dilihat tidak hanya sebagai strategi politik, tetapi juga sebagai proyek moral dan epistemik yang menantang struktur pengetahuan kolonial sekaligus memperkuat norma-norma hak asasi manusia. Dengan menggabungkan kritik postkolonial (untuk mendekonstruksi narasi dominan) dan analisis difusi norma (untuk menelusuri proses transnasional), penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana gerakan dari konteks terpinggirkan dapat membentuk norma global dan merebut kembali kedaulatan naratif.

3. METODE PENELITIAN/RESEARCH DESIGN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan *intensive single case study* (studi kasus tunggal intensif). Kasus yang dipilih adalah gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) yang berlangsung sejak tahun 2005 hingga saat ini. Gerakan BDS dipilih karena merepresentasikan gerakan transnasional yang paling berkelanjutan dan memiliki konektivitas global dalam menantang pendudukan Israel. Durasi panjang serta dokumentasi yang luas menjadikan BDS sebagai bahan penting untuk menganalisis tidak hanya hasil taktisnya, tetapi juga proses yang lebih dalam terkait pembentukan norma dan perlawanan terhadap kolonialisme pengetahuan (*epistemic colonialism*).

Data penelitian dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui analisis dokumen, yang mencakup publikasi resmi BDS (seperti panduan dan pernyataan publik), laporan dari organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, serta komunikasi korporasi terkait keputusan divestasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui analisis wacana digital, dengan fokus pada bagaimana pendukung BDS membangun dan menyebarkan *counter-narrative* (narasi tandingan) di platform seperti Twitter/X, Instagram, dan situs resmi BDS. Analisis menyoroti tema-tema berulang, aktivisme berbasis *hashtag*, serta pola pembingkai (*framing patterns*) yang membentuk solidaritas transnasional di ruang digital.

Interpretasi data dilakukan dengan menggunakan kerangka teoretis kritis yang mengintegrasikan pendekatan *postcolonial* dan *normative*. Lensa *postcolonial* digunakan untuk mendekonstruksi representasi dominan atas konflik dan menelusuri bagaimana BDS merebut kembali ruang naratifnya. Sementara itu, lensa *normative* digunakan untuk memetakan fungsi gerakan BDS sebagai *norm entrepreneur*, dengan menelusuri tahapan *Norm Life Cycle*—yakni kemunculan (*emergence*), penyebaran (*cascade*), dan internalisasi (*internalization*). Untuk menjaga ketelitian analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi

dengan memeriksa silang berbagai sumber data serta mempertahankan reflektivitas sepanjang proses interpretatif.

Mengingat sifat penelitian ini yang interpretatif dan kritis, peneliti menyadari bahwa analisis tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari sudut pandang pribadi dan latar belakang akademik. Oleh karena itu, upaya dilakukan untuk menjaga ketepatan analisis melalui dokumentasi proses penelitian yang transparan dan verifikasi data dari berbagai sumber. Peneliti memposisikan diri bukan sebagai pengamat netral, melainkan sebagai analis terhadap relasi kuasa dan pembentukan wacana dalam masyarakat sipil global. Pendekatan reflektif ini bertujuan menyeimbangkan antara keterlibatan kritis dan ketepatan empiris.

4. HASIL ANALISIS

4.1. Dekolonisasi melalui Benang, Suara dan Puisi

Frantz Fanon dalam karyanya *The Wretched of the Earth* (1961), menjelaskan bahwa kolonialisme adalah sebuah sistem kekerasan total yang merusak jiwa dan kesadaran manusia yang terjajah. Fanon berargumen bahwa dalam konteks kolonial, kekerasan yang dilakukan oleh penjajah bersifat sistemik dan dehumanisasi. Fanon menantang diskriminasi sistemik yang merupakan ciri inti dari negara kolonial pemukim yang merupakan sebuah realitas yang sering kali terpinggirkan dalam diskusi internasional. Dalam konteks *settler colonialism* (kolonialisme pemukim yang didorong oleh logika eliminasi, tindakan pelestarian dan ekspresi budaya melampaui fungsi estetika atau seremonial (Fanon 1961). Setiap praktik budaya menjadi sebuah "arsip hidup" (*living archive*) dan "arsip tandingan" (*counter-archive*), sebuah repositori dinamis dari ingatan, identitas, dan klaim atas tanah yang secara aktif menentang upaya penghapusan oleh penjajah. Praktik-praktik ini merupakan refleksi pasif dari perlawanan terhadap penjajah yang dipertahankan dari generasi ke generasi (Roxy 2024).

Tatreez dianggap sebagai materi budaya terpenting di Palestina (Atalla 2023). Praktik budaya ini berfungsi sebagai bahasa visual melalui media benang berwarna-warni yang dijahit pada *thobe* (gaun tradisional) dan mendokumentasikan kehidupan penjahit melalui gaya sulaman, warna, dan motif yang bisa menceritakan kehidupan seperti menandakan desa asal seorang wanita dan status perkawinannya. (Al-Yousuf 2023). Nakba tahun 1948 secara drastis mengubah praktik dan makna *tatreez*. Pengungsian massal dan kemiskinan yang diakibatkan Nakba menjadikan sulaman yang memakan waktu sebagai sebuah kemewahan yang ditinggalkan, dan banyak pola serta tradisi regional hilang bersamaan dengan hilangnya desa-desa. Namun, pada saat yang sama, *tatreez* diadopsi sebagai landasan warisan nasional yang menjadi sebuah cara yang kuat untuk membawa ingatan akan tanah air yang hilang (Sheets 2024). Evolusi *tatreez* mencapai puncaknya ketika dijadikan sebagai alat perlawanan politik selama Intifada Pertama pada tahun 1987 sampai 1993. Pada saat itu, otoritas pendudukan Israel melarang pengibaran bendera Palestina dan penggunaan warnanya (merah, hijau, hitam, dan putih) di depan umum. Sebagai respons langsung terhadap larangan ini, perempuan Palestina mulai menciptakan apa yang dikenal sebagai "*thobe al-intifada*" atau "Gaun Intifada". Pada gaun-gaun ini, motif-motif tradisional bercampur dengan simbol-simbol perlawanan yang dilarang seperti bendera Palestina, peta Palestina, cabang zaitun, dan burung merpati. Tindakan ini dengan jelas

mempolitisasi *tatreez* yang menunjukkan kemampuannya yang dipakai untuk beradaptasi dari praktik budaya bahasa identitas sosial menjadi senjata pembangkangan politik (Ghnaim 2018)

Bagi generasi pengungsi Palestina tahun 1948, yang banyak di antaranya buta huruf, transmisi lisan menjadi satu-satunya cara untuk melestarikan warisan budaya dan ingatan kolektif tentang Nakba. Oleh karena itu, sejarah lisan merupakan kumpulan anekdot dan metode utama untuk membangun *counter archive* yang menantang historiografi Zionis resmi yang secara aktif menghapus atau meminimalkan peristiwa pengusiran massal. Proyek-proyek seperti "*Palestine Remembered*," "*The Nakba Archive*," dan "*Voices: Palestinian Women Narrate Displacement*" telah muncul sebagai upaya krusial untuk merekam dan mendigitalkan kesaksian-kesaksian ini sebelum sejarah dihilangkan (Al-Shara 2024). Salah satu upaya *counter archive* ini adalah sastra dan musik yang berfungsi sebagai cermin yang merefleksikan sejarah politik dan perjuangan bangsa. Mengacu pada kerangka *Resistance Literature* (1987) dari Barbara Harlow, praktik sastra harus dipahami sebagai agen perlawanan aktif yang menantang struktur kekuasaan dominan dan menuntut pengakuan bagi suara-suara yang terpinggirkan (Harlow 1987). Melalui sastra, para penulis dari bangsa-bangsa terjajah menegaskan agensi mereka yang bisa merebut kembali sejarah dan identitas mereka dari distorsi wacana kolonial. Puisi Mahmoud Darwish (1941-2008) adalah salah satu contohnya. Karya Darwish menangkap kesadaran dan ingatan kolektif Palestina dan juga diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa yang mengartikulasikan tema-tema inti pengalaman Palestina, yaitu pengasingan, kehilangan, cinta yang mendalam untuk tanah air yang dirampas, dan ketahanan identitas dalam menghadapi penghapusan. Darwish memberikan bahasa kepada dunia untuk memahami penderitaan Palestina (Al-Shara 2024).

Tabel 2. Perlawanan melalui Ekspresi Praktik Budaya Palestina dan Tema yang Dilestarikan

No	Ekspresi Perlawanan Melalui Budaya	Tema Inti / Memori yang Dilestarikan
1	<i>Tatreez</i> dengan motif bendera, peta Palestina, dan cabang zaitun.	Penolakan terhadap pendudukan, penghapusan simbol nasional, dan perampasan tanah.
2	Seluruh Praktik Budaya (Sastra, seni, <i>tatreez</i>) sebagai penegasan kemanusiaan, seperti yang dianalisis Frantz Fanon.	Perjuangan untuk martabat, pengakuan, dan subjektivitas dekolonial melawan dehumanisasi dan diskriminasi sistemik.
3	Sejarah Lisan (Memori Nakba), dan Puisi Mahmoud Darwish.	Melestarikan ingatan kolektif tentang pengusiran (Nakba 1948).

Sumber: Kompilasi penulis berdasarkan Artikel Jurnal oleh Roxy (2024), Al-Yousuf (2023), Sheets (2024), Al-Shara (2024).

Memasuki abad ke-21, perlawanan Palestina mengalami evolusi strategis yang signifikan. Setelah beberapa dekade perjuangan bersenjata, diplomasi yang gagal, dan pemberontakan rakyat, sebuah bentuk perlawanan baru yang terstruktur, non-kekerasan, dan berorientasi global muncul yang berbentuk Gerakan *Boycott, Divestment and Sanctions* (BDS). Lahirnya gerakan BDS tidak dapat dipisahkan dari konteks kegagalan politik dan hukum yang mendalam pada awal tahun 2000-an. Proses Perdamaian Oslo, yang dimulai pada tahun 1990-an, telah gagal total dalam mewujudkan negara Palestina yang berdaulat dan malah dilihat oleh banyak orang Palestina sebagai mekanisme untuk mengelola dan melanggengkan pendudukan (Bot 2019). Pemicu langsung untuk seruan BDS adalah pembangunan Tembok Pemisah Israel di Tepi Barat. Pada 9 Juli 2004, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ), mengeluarkan pendapat nasihat (advisory opinion) yang menyatakan bahwa pembangunan tembok tersebut di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal menurut hukum internasional (Bot 2019). ICJ menuntut agar Israel menghentikan pembangunan, membongkar bagian yang sudah dibangun, dan memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.²⁶ Pendapat ini kemudian didukung oleh Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/ES-10/15 pada 20 Juli 2004, yang menuntut Israel untuk mematuhi putusan tersebut. Namun, Israel mengabaikan baik pendapat ICJ maupun resolusi PBB dan melanjutkan pembangunan tembok tersebut (Bot 2019).

Tepat satu tahun setelah pendapat ICJ, pada 9 Juli 2005, sebuah koalisi luas yang terdiri dari lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina mengeluarkan seruan untuk Boikot, Divestasi, dan Sanksi. Seruan ini secara eksplisit menyatakan bahwa karena *"all forms of international intervention and peace efforts to date have failed to convince or compel Israel to comply with humanitarian law,"* maka masyarakat sipil internasional dan orang-orang yang memiliki nurani di seluruh dunia dipanggil untuk memberlakukan tindakan hukuman non-kekerasan (Bot 2019).

Seruan BDS mengartikulasikan tiga tuntutan inti yang jelas dan berbasis hak, yang harus dipenuhi Israel sebelum kampanye dihentikan:

1. Mengakhiri pendudukan dan kolonisasinya atas semua tanah Arab dan membongkar Tembok.
2. Mengakui hak-hak fundamental warga Arab-Palestina di Israel untuk kesetaraan penuh.
3. Menghormati, melindungi, dan mempromosikan hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dan properti mereka sebagaimana diatur dalam Resolusi PBB 194 (Farber 2025).

Tiga tuntutan inti dari gerakan BDS dapat dipahami sebagai formalisasi politik dari tema-tema yang menjadi inti dari ekspresi budaya perlawanan Palestina. Gerakan BDS memformulasikan tiga tuntutan utama yang menghubungkan ekspresi budaya dengan perjuangan politik. Pertama, tuntutan untuk mengakhiri pendudukan dan membongkar tembok pemisah merepresentasikan perlawanan terhadap penghapusan identitas nasional, sebagaimana tergambar dalam simbol-simbol budaya seperti "Gaun Intifada" dan pohon zaitun yang melambangkan ketahanan dan keterikatan pada tanah air (Dedman 2022).

Kedua, tuntutan kesetaraan penuh bagi warga Arab-Palestina di Israel menegaskan martabat manusia sebagaimana dianalisis Frantz Fanon (1961), bahwa dekolonisasi adalah upaya mengembalikan kemanusiaan yang dirampas oleh sistem kolonial pemukim. Ketiga, tuntutan hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina merupakan artikulasi hukum dari memori kolektif Nakba, yang diwujudkan dalam simbol-simbol seperti kunci rumah dan puisi Mahmoud Darwish, serta diperkuat oleh legitimasi hukum internasional melalui Resolusi PBB 194 (Bot 2019; Al-Shara 2024).

Melalui ini, gerakan BDS dapat dilihat sebagai proses penerjemahan yang mana BDS mengambil *counter-archive* dan menerjemahkannya ke dalam bahasa hak asasi manusia universal dan hukum internasional (Hitchcock 2020). Keberhasilan BDS juga sangat bergantung pada kemampuan diaspora untuk membangun dan memelihara jaringan solidaritas transnasional yang luas. Para aktivis diaspora menghubungkan panggilan dari masyarakat sipil Palestina di lapangan dengan calon sekutu internasional. Mereka membangun koalisi dengan beragam aktor global, termasuk serikat pekerja, gereja, asosiasi akademik, dan gerakan lainnya. Contohnya termasuk serikat pekerja transportasi di Belgia yang menolak untuk menangani pengiriman senjata ke Israel, pekerja pelabuhan Italia yang memblokir pengiriman kargo, dan federasi serikat pekerja di India yang menentang pengiriman pekerja untuk menggantikan pekerja Palestina (Abu 2024).

4.2. Dampak Ekonomi & Jaringan Transnasional

Gerakan BDS (*Boycott, Divestment, and Sanctions*) berakar dari *BDS Call* yang diserukan oleh koalisi masyarakat sipil Palestina pada tahun 2005. Deklarasi ini mengajak masyarakat sipil internasional dan orang-orang yang memiliki hati nurani untuk menjalankan boikot dan divestasi terhadap Israel serta menekan negara masing-masing agar menerapkan embargo dan sanksi. Terinspirasi dari gerakan serupa terhadap rezim apartheid Afrika Selatan, BDS mendasarkan seruannya pada tanggung jawab moral dan solidaritas internasional untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Gerakan ini akan terus diserukan hingga Israel menghentikan pendudukan wilayah Palestina dan memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional, termasuk pengakuan atas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri (BDS Movement, 2005)

Dalam pelaksanaannya, BDS mengandalkan tiga pendekatan utama, yaitu riset, kampanye, dan advokasi yang dijalankan oleh jaringan aktivis global di bawah koordinasi *BDS National Committee (BNC)* yang berkedudukan di Palestina (BDS Movement, 2005). Ketiga pendekatan tersebut berfungsi sebagai mekanisme difusi norma. Melalui riset, gerakan ini membangun legitimasi moral dan epistemik terhadap gagasan bahwa *boikot, divestasi, dan sanksi adalah tanggung jawab moral serta bentuk solidaritas internasional*. Melalui kampanye dan advokasi, norma tersebut disebarluaskan dan dinormalisasi dalam wacana publik global.

Kampanye BDS terbukti cukup berpengaruh terhadap persepsi publik global mengenai legitimasi Israel. Data *Pew Research Center* pada tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas negara yang disurvei memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Di Eropa Barat, sentimen "sangat tidak menyukai" Israel mencapai 78% di Belanda, 75% di Swedia, 72% di Yunani, dan 66% di Italia. Bahkan di Asia, 80% responden di Indonesia dan 79% di Jepang menilai

Israel secara negatif. Secara global, median negara menunjukkan 62% responden memiliki opini tidak menyenangkan terhadap Israel, sedangkan hanya 29% yang menyatakan pandangan positif. Survei yang sama juga memperlihatkan bahwa kelompok ideologis kiri di berbagai negara memiliki pandangan yang jauh lebih negatif terhadap Israel dibandingkan kelompok kanan. Di Australia, perbedaan pandangan antara kiri dan kanan mencapai +44 poin (90% kiri tidak menyukai Israel dibanding 46% kanan); di Amerika Serikat dan Yunani, selisihnya juga mencapai +44 dan +31 poin. Di negara-negara seperti Swedia, Italia, dan Inggris, perbedaannya berkisar antara +22 hingga +25 poin. Data ini memperlihatkan bahwa kritik terhadap Israel kini menjadi bagian dari kesadaran moral di dunia Barat (Beshay, 2025). Data ini juga mengindikasikan bahwa norma moral tentang keadilan bagi Palestina telah mengalami tahapan *cascade* dalam siklus kehidupan norma di mana nilai-nilai yang awalnya hanya dianut oleh kelompok aktivis kini telah menyebar menjadi opini publik global (Finnemore & Sikkink, 1998).

Berbagai lembaga internasional mulai mengadopsi posisi hukum yang sebelumnya dikampanyekan oleh BDS. Hal ini terjadi setelah putusan *International Court of Justice (ICJ)* yang menyatakan bahwa pendudukan dan aneksasi Israel atas wilayah Palestina ilegal. Pada September 2024, Majelis Umum PBB untuk pertama kalinya dalam 42 tahun mengesahkan resolusi yang menyerukan sanksi terhadap Israel. Lebih dari 30 pakar HAM PBB juga secara terbuka menyerukan negara-negara untuk memberlakukan embargo militer terhadap Israel sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan ICJ. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran dari *moral persuasion* menuju tekanan hukum formal di tingkat global (BDS Movement, 2025).

Hal serupa juga terjadi di sektor akademik khususnya universitas dan mahasiswa. Di Inggris, Universitas Leeds pada tahun 2018 memutuskan untuk melepaskan investasi senilai lebih dari £1,2 juta dari tiga perusahaan yang terlibat dalam perdagangan senjata dengan Israel setelah mendapatkan tekanan dari mahasiswa dan alumni (Middle East Monitor, 2018). Sementara itu, Universitas Nottingham melalui cabang *University and College Union (UCU)* pada tahun 2024 mengadopsi *BDS pledge* yang menyerukan solidaritas terhadap rakyat Palestina dan boikot akademik terhadap institusi Israel (University of Nottingham, 2024). Universitas Ghent di Belgia pada Mei 2024 secara resmi memutus seluruh kerja sama penelitian dengan universitas dan lembaga riset Israel setelah melakukan penilaian etis berdasarkan kebijakan HAM internal (Reuters, 2024). Di tahun yang sama, *Canadian Association of University Teachers* dengan jumlah anggota 72.000 orang mendukung hak akademisi menyerukan BDS. Sementara, *Amsterdam School for Cultural Analysis* dan *Tilburg University* menanggukkan kerja sama akademik dengan universitas Israel serta 84% staf Universitas Amsterdam melakukan mogok akademik selama empat hari mendukung boikot (BDS Movement, 2025). *Students for Justice in Palestine (SJP)* Amerika Serikat juga mengeluarkan surat terbuka kepada kampus di seluruh negeri untuk menuntut pertanggungjawaban institusional dan divestasi segera dari Israel dan genosida yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina di Gaza (National SJP, 2024).

Dari sudut pandang *norm's life cycle* dari Finnemore dan Sikkink (1998), fenomena ini menjadi bukti peran aktor non-negara, dalam hal ini Gerakan BDS dan jaringannya sebagai *norm entrepreneurs* yang menanamkan nilai kemanusiaan dan keadilan ke dalam ranah kelembagaan. Pergeseran dari aktivisme akar rumput menuju keputusan formal universitas

dan lembaga riset menandakan proses *internalization* dari norma-norma baru tersebut dalam praktik kelembagaan. Perubahan kebijakan kampus dan lembaga riset merupakan wujud transformasi moral yang telah mengubah pemahaman global tentang legitimasi dan tanggung jawab etis.

Serikat buruh dan NGO juga berperan dalam memperjuangkan norma yang diserukan oleh Gerakan BDS. *Congress of South African Trade Unions (COSATU)*, konfederasi serikat pekerja Afrika Selatan berperan dalam memperkuat dimensi solidaritas global BDS melalui mobilisasi akar rumput dan penguatan norma anti-apartheid yang berakar dari pengalaman historis bangsa Afrika Selatan melawan sistem penindasan rasial. Dalam berbagai pernyataan resminya, di antaranya *COSATU Statement on International Solidarity with Palestine* (2014) dan *COSATU Calls for Boycott of Israel* (2018), COSATU secara terbuka mendukung BDS dan menyerukan pemutusan hubungan diplomatik serta penghentian perdagangan dengan Israel. COSATU juga mengorganisir aksi solidaritas nasional seperti demonstrasi "Free Palestine" di Johannesburg dan Cape Town serta menekan pemerintah Afrika Selatan untuk menurunkan tingkat hubungan diplomatiknya dengan Israel. Dalam perspektif postkolonial, dukungan tersebut menunjukkan keberlanjutan "memori kolonial" yang melintasi waktu dan geografi di mana pengalaman Selatan Global terhadap kekerasan kolonial menjadi dasar untuk membangun solidaritas moral global (Chowdhry & Nair, 2002).

Sebagai organisasi HAM global dengan legitimasi tinggi, *Amnesty International* berperan melalui produksi dan difusi norma mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel di wilayah Palestina. Dalam laporan investigatif berjudul "*Israel's Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity*" pada tahun 2022, mereka secara tegas menyimpulkan bahwa kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina memenuhi definisi apartheid sebagaimana diatur dalam *International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid* (1973) dan *Rome Statute of the International Criminal Court* (1998). *Amnesty International* juga menyerukan agar negara-negara di dunia menghentikan pasokan senjata dan kerja sama militer dengan Israel sebagai bentuk tekanan politik dan ekonomi hingga pelanggaran tersebut dihentikan (Amnesty International, 2022). Dalam konteks ini, *Amnesty International* berperan sebagai aktor epistemik postkolonial yang menantang klaim netralitas hukum internasional Barat dan merebut kembali otoritas moral untuk mendefinisikan pelanggaran HAM (Said, 1993).

Tekanan moral dari publik global kemudian bertransformasi menjadi keputusan ekonomi dan politik institusional. Salah satunya adalah penarikan diri Orange, operator telekomunikasi Prancis, dari kerja sama dengan Partner Communication, perusahaan telekomunikasi Israel pada tahun 2016 (Cohen et al., 2016). Keputusan ini mengikuti tekanan publik di Mesir dan Prancis yang mengorganisir boikot terhadap Mobinil, anak perusahaan Orange setelah diketahui bahwa Partner Communication memberikan dukungan telekomunikasi dan layanan hiburan bagi tentara Israel selama agresi di Gaza tahun 2014 (BDS Movement, 2016).

Kasus Veolia menjadi salah satu bukti lain keberhasilan tekanan ekonomi Gerakan BDS terhadap korporasi multinasional. Perusahaan asal Prancis ini sebelumnya terlibat dalam proyek *Jerusalem Light Rail* di daerah permukiman ilegal Israel di Yerusalem Timur. Sepanjang 2008 hingga 2015, Gerakan BDS meluncurkan kampanye global menentang keterlibatan Veolia dalam pendudukan Palestina. Tekanan ini berpengaruh pada penolakan kontrak Veolia oleh Kuwait dan sejumlah negara Eropa. Akibat tekanan moral dan

reputasional ini, Veolia kehilangan tender senilai lebih dari 20 miliar dolar AS. Pada September 2015, Veolia menjual seluruh sahamnya dalam proyek tersebut dan sepenuhnya keluar dari pasar Israel (BDS Movement, 2015).

Pada 2024, *AXA* menjual seluruh investasinya di bank-bank Israel. *Storebrand* dan *Norway's Sovereign Wealth Fund* melakukan divestasi besar-besaran dari perusahaan Israel. Begitupun dengan *Chevron* yang menunda ekspansi proyek gas senilai USD 429 juta di wilayah pendudukan. *PUMA* dan *Carrefour* menghentikan hubungan bisnis dengan mitra Israel setelah tekanan publik meningkat di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Di sisi lain, *S&P* melaporkan pertumbuhan ekonomi Israel tahun 2024 stagnan di angka 0%, dengan lebih dari 60.000 bisnis domestik tutup akibat ketidakstabilan politik dan tekanan ekonomi internasional (BDS Movement, 2025).

Perubahan sikap kedua contoh korporasi dan lainnya menunjukkan bahwa narasi moral yang dibangun BDS telah bertransformasi menjadi tekanan ekonomi konkret. Keputusan perusahaan-perusahaan besar seperti Veolia untuk menarik diri dari proyek Israel berkontribusi terhadap efek domino yang melemahkan legitimasi politik dan moral Israel di tingkat global. Boikot ini memperkuat narasi bahwa keterlibatan ekonomi dalam pendudukan ilegal Israel merupakan persoalan etika yang membawa konsekuensi reputasional dan politik aktor di dunia internasional.

Dalam perspektif postkolonial, kedua kasus ini menggambarkan bentuk dekonstruksi terhadap relasi ekonomi kolonial. Struktur kapitalisme global yang biasanya menopang kekuasaan kolonial melalui investasi dan eksploitasi sumber daya digunakan sebagai instrumen perlawanan oleh masyarakat sipil global. Boikot terhadap Veolia dan Orange menjadi contoh konkret dari apa yang disebut Robert Cox (1981) sebagai *counter-hegemonic practice*, yaitu praktik sosial untuk menantang hegemoni ekonomi dan politik dominan melalui moralitas transnasional. Di sisi lain, dari perspektif *norm's life cycle*, keberhasilan boikot ini menunjukkan proses *internalization* norma ke dalam perilaku korporasi internasional ketika keputusan ekonomi tunduk pada ekspektasi moral global tentang keadilan.

Menghadapi tekanan dari Gerakan BDS, Israel mengeluarkan sejumlah kebijakan anti-BDS. Pada tahun 2011, Lembaga Parlemen mengesahkan undang-undang anti-BDS yang menjadikan seruan untuk memboikot Israel sebagai bagian hukum perdata (Azulay, 2011). Pada tahun 2018, Kementerian Urusan Strategis Israel menerbitkan daftar 20 kelompok internasional yang anggotanya akan dilarang masuk ke negara tersebut karena dukungan mereka terhadap gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) (Ashly, 2018). Gerakan BDS juga mendapatkan penolakan negara lain. Di Amerika Serikat, 38 negara bagian telah mengesahkan undang-undang dan perintah eksekutif yang dirancang untuk mencegah pemboikotan terhadap Israel (Jewish Virtual Library, 2024). Respons ini adalah salah satu bentuk upaya negara kolonial dan sekutunya berupaya untuk mempertahankan monopoli atas kebenaran dan legitimasi politiknya. Dengan peran dan perlawanan masyarakat sipil global yang semakin nyata dan kuat, kekuasaan dalam tatanan internasional tidak hanya milik negara, namun juga milik jaringan aktivis transnasional yang mengusung moralitas publik dan solidaritas global.

4.3 Kekuatan Normatif di Ruang Digital

Dalam kerangka Teori Kritis Hubungan Internasional, kekuasaan tidak semata-mata diwujudkan melalui kontrol material, tetapi juga melalui dominasi wacana dan produksi pengetahuan (Cox, 1981; Linklater, 1998). Ruang digital kemudian menjadi arena baru bagi pertarungan epistemik ini. Melalui kampanye daring, gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) membangun *counter-narrative* terhadap dominasi wacana yang selama ini dikendalikan oleh negara dan media arus utama Barat. Platform seperti X (Twitter), Instagram, dan TikTok menjadi media alternatif yang memungkinkan penyebaran informasi mengenai pelanggaran HAM, blokade ekonomi, dan pendudukan wilayah Palestina secara cepat, luas, dan lintas batas negara. Strategi ini menunjukkan bentuk baru dari *normative power* yang tidak bersandar pada otoritas negara, melainkan pada legitimasi moral dan partisipasi publik global.

Kekuatan normatif yang muncul dari ruang digital ini bekerja melalui logika "*networked solidarity*" — solidaritas yang terdesentralisasi dan tumbuh dari interaksi horizontal antarwarga dunia. Hashtag seperti #BoycottPuma, #FreePalestine, dan #NoTechForApartheid berfungsi bukan sekadar sebagai simbol emosional, tetapi sebagai penghubung informasi faktual mengenai keterlibatan perusahaan tertentu dalam praktik kolonialisme ekonomi. Dengan mendiseminasikan data yang diverifikasi oleh lembaga seperti Who Profits atau Investigate, kampanye digital ini memperkuat basis rasional boikot, bukan hanya moralitas spontan. Data semacam itu menelusuri aliran dana, investasi, dan kontrak perusahaan multinasional yang secara langsung atau tidak langsung mendukung proyek pemukiman ilegal Israel. Melalui basis data publik yang transparan, masyarakat internasional tidak hanya "menolak" secara simbolik, tetapi juga mengambil keputusan konsumen berbasis pengetahuan.

Selain sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan ekonomi dan politik, BDS dalam ruang digital juga menantang apa yang disebut Edward Said (1978) sebagai kolonialisme epistemik — yaitu dominasi narasi dan pengetahuan oleh kekuatan kolonial yang menentukan apa yang dianggap "benar" atau "rasional". Dengan memproduksi narasi tandingan yang bersumber dari pengalaman masyarakat sipil Palestina dan jaringan solidaritas global, BDS membuka ruang bagi artikulasi kebenaran alternatif. Misalnya, penggunaan simbol semangka di media sosial setelah agresi Israel tahun 2023 menjadi bentuk "bahasa perlawanan" yang menembus sensor algoritmik dan membangun *collective identity* global. Dalam konteks ini, kekuatan digital bukan hanya alat komunikasi, melainkan arena pembentukan kesadaran politik baru yang bersifat inklusif dan partisipatif.

Lebih jauh, kampanye digital BDS menunjukkan bagaimana norma internasional dapat direproduksi dari bawah (*bottom-up norm diffusion*). Ketika institusi formal seperti PBB dan ICC gagal menegakkan akuntabilitas, masyarakat sipil global menggunakan ruang digital untuk memperluas tekanan normatif terhadap negara dan korporasi. Petisi daring, kampanye visual, dan inisiatif *crowdsourcing data* menjadi sarana baru pembentukan norma moral transnasional yang menolak kekerasan struktural. Dengan demikian, BDS tidak hanya menjadi gerakan politik, tetapi juga laboratorium sosial di mana masyarakat global berlatih membangun keadilan melalui pengetahuan bersama.

4.4 Analisis: Gerakan BDS dan Pergeseran Kekuasaan Global

Gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) dapat dipahami sebagai ekspresi baru dari kekuasaan normatif yang muncul dari masyarakat sipil global di tengah stagnasi lembaga-lembaga internasional formal. Dalam kerangka teori kritis hubungan internasional, BDS bukan hanya gerakan moral, tetapi juga bentuk *counter-hegemonic practice* yang berupaya mendestabilisasi dominasi epistemik dan politik negara-negara besar dalam sistem internasional (Cox, 1981; Linklater, 1998). Gagasan ini sejalan dengan perspektif

postkolonial yang menekankan bahwa pengetahuan, hukum, dan norma global sering kali diproduksi dalam struktur kolonial yang memihak pada kekuatan dominan (Said, 1978; Chowdhry & Nair, 2002). Dalam konteks Palestina, dominasi epistemik ini tampak jelas dalam cara pelanggaran HAM dan pendudukan militer kerap direduksi menjadi “konflik dua pihak”, alih-alih kolonialisme pemukim (*settler colonialism*).

Kegagalan lembaga formal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menegakkan akuntabilitas terhadap agresi Israel memperkuat legitimasi gerakan alternatif seperti BDS. Meskipun berbagai resolusi telah disahkan, veto politik dari negara besar, terutama Amerika Serikat, menghambat implementasi nyata di lapangan (Brown, 2023; UN News, 2023). Dalam situasi ini, *agency* berpindah ke tangan aktor non-negara yang menggunakan strategi berbasis masyarakat sipil global untuk menuntut keadilan. BDS kemudian berperan sebagai *transnational accountability mechanism*—mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh institusi internasional melalui tekanan publik, kampanye digital, dan advokasi ekonomi.

Salah satu strategi paling signifikan dari BDS adalah pemanfaatan data dan riset independen untuk memetakan hubungan finansial antara lembaga, perusahaan, dan pendanaan terhadap pendudukan Israel. Data yang dihimpun oleh *Who Profits* dan *BDS National Committee* (BNC) secara rinci menelusuri keterlibatan korporasi seperti HP, AXA, dan Caterpillar dalam proyek-proyek permukiman ilegal di Tepi Barat (Who Profits, 2022; BNC, 2023). Pendekatan berbasis data ini menjadikan boikot tidak bersandar pada emosi politik semata, tetapi pada bukti empiris yang terverifikasi. Dengan demikian, keputusan untuk memboikot menjadi bentuk partisipasi etis yang diinformasikan oleh transparansi dan akuntabilitas publik. Strategi semacam ini memperlihatkan kemampuan BDS untuk memadukan *knowledge production* dengan *economic leverage*, sehingga menantang logika kapitalisme global yang selama ini menopang struktur kolonialisme ekonomi.

Di ranah digital, kekuatan BDS semakin mengakar melalui praktik *digital resistance*. Kampanye daring seperti #BoycottPuma, #FreePalestine, dan penggunaan simbol semangka di Instagram menjadi instrumen *counter-narrative* terhadap sensor algoritmik dan bias media arus utama (Abunimah, 2023; Noura Erakat, 2021). Melalui ruang digital ini, solidaritas lintas negara terbangun secara organik dan desentralistik—menunjukkan bentuk baru diplomasi rakyat (*people's diplomacy*) yang menyaingi diplomasi negara. Temuan ini mendukung pandangan bahwa dalam era globalisasi informasi, kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di lembaga formal, tetapi terdistribusi melalui jaringan digital dan praksis simbolik (Castells, 2009; Couldry & Mejias, 2019).

Keterkaitan antara temuan empiris dan teori kritis menjadi semakin jelas ketika melihat transformasi locus kekuasaan global. Jika teori kritis menekankan pentingnya mengungkap struktur kekuasaan dan ideologi di balik tatanan dunia (Cox, 1981), maka praktik BDS menunjukkan bagaimana *counter-structure* tersebut dapat dibangun melalui solidaritas, produksi pengetahuan, dan tekanan moral-ekonomi. Melalui lensa postkolonial, BDS mengembalikan agensi pada masyarakat tertindas dengan cara menolak narasi dominan dan menulis ulang wacana keadilan global dari Selatan Global. Sementara dari perspektif normatif, BDS berfungsi sebagai *norm entrepreneur* yang mendorong lahirnya norma baru: bahwa keterlibatan ekonomi dalam pendudukan dan genosida bukanlah tindakan netral, melainkan bentuk kolusi moral yang dapat ditolak melalui boikot (Finnemore & Sikkink, 1998).

Dengan demikian, BDS dapat dilihat sebagai eksperimen politik yang menggabungkan etika, ekonomi, dan komunikasi digital dalam satu sistem aksi transnasional. Ia beroperasi di luar batas negara namun memiliki kapasitas untuk menekan aktor negara dan korporasi global—suatu bentuk redistribusi kekuasaan yang merefleksikan perubahan mendasar dalam dinamika hubungan internasional kontemporer.



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

4.5 Implikasi Moral dari Narasi yang Direbut Kembali oleh Israel di Forum Global

Mengacu pada karya Andreas Krieg, narasi yang disponsori negara dapat dianalisis sebagai bentuk subversion yang dirancang untuk merusak sociopolitical center of gravity lawan. Tujuannya adalah untuk mengikis konsensus sosial dan politik di dalam masyarakat yang menjadi target dengan memanipulasi ruang publik. Narasi yang dipersenjatai ini bertujuan untuk meyakinkan sesama sekutu, dan juga untuk memecah belah lawan, dan pada akhirnya mengendalikan wacana publik sehingga melemahkan kemampuan masyarakat untuk membentuk respons yang koheren terhadap agresi (Briggs, 2025).

Dari perspektif psikologi sosial, masyarakat yang terlibat dalam konflik sering kali membangun narasi kolektif yang tidak hanya membenarkan tindakan mereka tetapi juga memperkuat kedudukan moral kelompok *ingroup* (internal). Narasi-narasi ini secara aktif membentuk dan memperkuat konten identitas sosial yang mendefinisikan identitas kolektif suatu kelompok. Dalam konteks yang terpolarisasi, narasi-narasi ini cenderung menjadi saling eksklusif, yang mana kelompok *outgroup* (lawan) digambarkan sebagai penjahat atau bahkan sebagai ancaman (Bliuc et al., 2022). Contoh dari narasi yang direbut kembali oleh Israel adalah dengan Hasbara (הסברה), yang artinya "menjelaskan," merupakan strategi yang menghubungkan "*information warfare with the strategic efforts of the state*" (perang informasi dengan upaya strategis negara). Tujuannya adalah untuk memperkuat persatuan di dalam negeri, memastikan dukungan sekutu, mengganggu koalisi yang memusuhi, dan menentukan bagaimana suatu didefinisikan di media global, di kalangan intelektual, dan di jejaring sosial. Di era digital, hasbara telah beradaptasi yang mana Strateginya mencakup pembentukan unit-unit pemerintah yang terorganisir untuk mengeksploitasi dunia maya, yang termasuk pembuatan situs web, akun media sosial, dan pesan yang dikaitkan dengan identitas palsu untuk menyebarkan narasi yang diinginkan. Israel juga dapat memanipulasi fungsi

peramban, algoritma mesin pencari, dan mekanisme otomatis lainnya untuk mengontrol informasi apa yang disajikan kepada pengguna internet. Praktik ini dapat memastikan bahwa komentar dan informasi tertentu akan atau tidak akan muncul dalam hasil pencarian, atau memberikan keunggulan pada materi lama yang kritis terhadap sumber tertentu daripada entri baru yang menguntungkan mereka. Strategi ini secara fundamental menggeser fokus dari menyensor aliran informasi menjadi membatasi permintaan akan informasi yang berlawanan melalui promosi selective hearing. Praktik hasbara ini harus dipertentangkan dengan kewajiban etis para pejabat publik. Penggunaan otoritas dan dana publik untuk menciptakan narasi yang mungkin, memanipulasi, atau melayani kepentingan politik yang sempit daripada kepentingan publik yang lebih luas (Middle East Policy Council, 2012).

5. KESIMPULAN/CONCLUSION

Studi ini menegaskan bahwa gerakan boikot, khususnya melalui kampanye *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS), bukan sekadar tindakan moral atau ekspresi solidaritas simbolik, melainkan praktik etis-politis yang menantang struktur ketidakadilan global. Boikot berfungsi sebagai mekanisme partisipasi politik masyarakat sipil global dalam menegakkan akuntabilitas ketika lembaga formal gagal menjalankan mandatnya. Melalui strategi yang menggabungkan data, advokasi digital, dan narasi budaya, BDS memperlihatkan bagaimana etika publik dapat diwujudkan dalam bentuk aksi transnasional yang konkret.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil global kini menjadi aktor normatif penting dalam menghadapi impunitas dan standar ganda dalam sistem internasional. Dengan memanfaatkan ruang digital dan jaringan lintas negara, masyarakat sipil mampu mendistribusikan kekuasaan simbolik yang sebelumnya dimonopoli oleh negara dan korporasi. Analisis wacana kritis menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi arena komunikasi, tetapi juga medan kontestasi makna—tempat narasi alternatif tentang keadilan dan kemanusiaan dirumuskan serta disebarluaskan.

Dari sisi kontribusi ilmiah, penelitian ini menghubungkan dua ranah yang sering dipisahkan: tradisi budaya sebagai sumber daya resistensi dan strategi politik transnasional sebagai ekspresi konkret perjuangan global. Dengan menelusuri transformasi simbol-simbol budaya Palestina menjadi instrumen politik, studi ini memperkaya literatur Hubungan Internasional kritis melalui bukti empiris mengenai bagaimana wacana dan aksi saling berkelindan dalam membentuk norma global. Dengan demikian, BDS menjadi contoh nyata bagaimana teori poskolonial dan pendekatan normatif dapat dioperasionalkan dalam studi empiris.

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal mengukur dampak ekonomi boikot secara presisi. Kompleksitas rantai pasok global dan keterlibatan banyak aktor menjadikan hasil finansial sulit dilacak secara terisolasi. Selain itu, keberhasilan moral dan kultural dari gerakan ini tidak selalu tercermin dalam indikator material. Karena itu, evaluasi keberhasilan boikot perlu mencakup dimensi simbolik dan normatif yang memengaruhi opini publik serta legitimasi politik.

Sebagai arah lanjutan, studi komparatif dengan gerakan boikot lain—seperti anti-apartheid di Afrika Selatan, boikot terhadap perusahaan yang merusak iklim, atau solidaritas terhadap Myanmar—dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana gerakan sosial global menegosiasikan kekuasaan dalam sistem internasional. Dengan menggunakan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*), penelitian masa depan dapat lebih dalam menelusuri bagaimana bahasa, simbol, dan media digital membentuk ruang resistensi terhadap ketimpangan struktural dalam tatanan global yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCE

- Abu Kmeil, T. N. (2024, February 2). *The global solidarity with the Palestinian cause: Breaking narratives and shaping policies*. Al Sharq Strategic Research.
<https://research.sharqforum.org/2024/02/02/the-global-solidarity-with-the-palestinian-cause-breaking-narratives-and-shaping-policies/>
- Abunimah, A. (2023). *The Palestine digital resistance: Countering algorithmic censorship*. Electronic Intifada.
- Al Jazeera English. (2023, December 8). *UN Security Council fails to adopt resolution on Gaza ceasefire*. Al Jazeera English.
<https://www.aljazeera.com/news/2023/12/8/unsc-fails-to-pass-gaza-ceasefire-resolution>
- Al-Shara, A. M. (2024). *Mahmoud Darwish: The poet of resistance*. *European Journal of English Language and Literature Studies*, 12(1), 1–10.
- Al-Yousuf, A. D. (2023, November 15). *The radical history of Palestinian tatreez*. *Atmos*.
<https://atmos.earth/fashion-and-design/palestinian-tatreez-embroidery-radical-history-resistance/>
- Amnesty International Ltd. (2022). ISRAEL'S APARTHEID AGAINST PALESTINIANS: CRUEL SYSTEM OF DOMINATION AND CRIME AGAINST HUMANITY. In *Amnesty International*. <https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/>
- Ashly, J. (2018, January 7). Israel bans entry for 20 groups over BDS support. *Al Jazeera*.
<https://www.aljazeera.com/news/2018/1/7/israel-bans-entry-for-20-groups-over-bds-support>
- Atalla, S. (2023, November 21). *Tatreez in time*. The Metropolitan Museum of Art.
<https://www.metmuseum.org/perspectives/tatreez-in-time>
- Azulay, M. (2011, November 11). *Knesset votes in favor of "boycott bill."* Ynetnews.
<https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4093950,00.html>
- Beshay. (2025, June 13). Most people across 24 surveyed countries have negative views of Israel and Netanyahu. *Pew Research Center*.
<https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/06/03/most-people-across-24-surveyed-countries-have-negative-views-of-israel-and-netanyahu/>
- BDS Movement. *About BNC*. <https://bdsmovement.net/BNC>
- BDS Movement. (2005). *BDS call*. <https://bdsmovement.net/bds-call>
- BDS Movement. (2015, August 31). *BDS marks another victory as Veolia sells off all Israeli operations*.
<https://bdsmovement.net/news/bds-marks-another-victory-veolia-sells-all-israeli-operations>
- BDS Movement. (2011, July 7). *COSATU endorses the Palestinian call to impose an immediate, comprehensive military embargo on Israel*.
<https://bdsmovement.net/news/cosatu-endorses-palestinian-call-impose-immediate-comprehensive-military-embargo-israel>
- BDS Movement. (2025, January 11). *Indicators of the BDS movement's Global Impact: July - December 2024*.
<https://bdsmovement.net/Indicators-BDS-Global-Impact-July-December-2024>
- BDS Movement. (2016, June 1). *Orange drops Israel affiliate following inspiring BDS campaign*.

- <https://bdsmovement.net/news/orange-drops-israel-affiliate-following-inspiring-bds-campaign>
- Bluic, A.-M., Betts, J., Vergani, M., & Smith, L. G. E. (2022). From cooperation to conflict: The role of collective narratives in intergroup conflict. *Political Psychology*, 43(S1), 5–23. <https://doi.org/10.1111/pops.12766>
- BNC (Boycott, Divestment, and Sanctions National Committee). (2023). *Corporate complicity and boycott guidelines*. <https://bdsmovement.net/>
- Bot, M. (2019). *The right to boycott: BDS, law, and politics in a global context*. *Transnational Legal Theory*, 10(3–4), 421–445. <https://doi.org/10.1080/20414005.2019.1672134>
- Brehony, N. (2020). *The Yemen war and the Western response*. *International Affairs*, 96(4), 1107–1124.
- Brown, C. (2023). *Double standards and global justice: The UN and the politics of selective accountability*. *International Affairs*, 99(4), 812–827.
- Briggs, C. M. (2025). Subversion: The strategic weaponization of narratives [Review of the book *Subversion: The strategic weaponization of narratives*, by A. Krieg]. *Journal of Strategic Security*, 18(1), 200–204. <https://digitalcommons.usf.edu/jss/vol18/iss1/12>
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Chowdhry, G., & Nair, S. (2002). *Power, postcolonialism and international relations: Reading race, gender and class*. Routledge.
- Cohen, T., Scheer, S., & Evans, D. (2016, February 16). *Israel mobile operator Partner cuts last ties with Orange*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/technology/israel-mobile-operator-partner-cuts-last-ties-with-orange-idUSKCN0VP1NM/>
- Couldry, N., & Mejias, U. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.
- Cox, R. (1981). *Social forces, states and world orders: Beyond international relations theory*. *Millennium: Journal of International Studies*, 10(2), 126–155.
- Dedman, R. (2022). *Material power: Embroidery, dress and resistance in Palestine* [Lecture description]. The Courtauld. <https://courtauld.ac.uk/whats-on/material-power-embroidery-dress-and-resistance-in-palestine/>
- Fanon, F. (1961). *The wretched of the earth* (C. Farrington, Trans.). Grove Press.
- Farber, S. (2025). *Weaponisation of academia: The Palestinian BDS movement and anti-Israel campus protests*. *Israel Affairs*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/13537121.2025.2516167>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). *International norm dynamics and political change*. *International Organization*, 52(4), 887–917.
- Ghnaim, W., & Abbasi-Ghnaim, F. (2018). *Tatreez & tea: Embroidery and storytelling in the Palestinian diaspora*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Harlow, B. (1987). *Resistance literature*. Methuen.
- Hitchcock, J. M. (2020). *A rhetorical frame analysis of Palestinian-led Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) movement discourse* [Master's thesis, Old Dominion University]. ODU Digital Commons. https://digitalcommons.odu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1102&context=english_etds

- International Criminal Court (ICC). (2023, October 29). *Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Karim A. A. Khan KC, on the situation in Palestine and Israel*. ICC Press Release. <https://www.icc-cpi.int/news>
- International Criminal Court. (2022, March 2). *Statement of ICC Prosecutor, Karim A. A. Khan QC, on the situation in Ukraine: Receipt of referrals from 39 States Parties and the opening of an investigation*. ICC.
- Investigate. (2023). *Database of corporate complicity in the Israeli occupation*. American Friends Service Committee.
- Linklater, A. (1998). *The transformation of political community: Ethical foundations of the post-Westphalian era*. Polity Press.
- Jewish Virtual Library. (2024). *State Anti-BDS legislation*.
<https://www.jewishvirtuallibrary.org/anti-bds-legislation>
- Middle East Monitor. (2018, November 6). *In first, UK university divests from firms supplying Israel army*.
<https://www.middleeastmonitor.com/20181105-in-first-uk-university-divests-from-firms-supplying-israel-army/>
- Middle East Policy Council. (2012). *Hasbara and the control of narrative as an element of strategy*. <https://mepc.org/speeches/hasbara-and-control-narrative-element-strategy/>
- Moon, R. (2024). *Outside the locus of control: Palestinian digital archives resist Israeli settler-colonial erasure*. *Journal of Palestine Studies*, 52(4), 37–52.
- National SJP. (2024). *Open Letter From SJP to American Universities*.
<https://www.nationalsjp.org/statement-17>
- Noura Erakat. (2021). *Justice for some: Law and the question of Palestine*. Stanford University Press.
- Reuters. (2024, May 31). *Belgium's Ghent University severs ties with all Israeli universities*. Reuters.
<https://www.reuters.com/world/europe/belgiums-ghent-university-severs-ties-with-all-israeli-universities-2024-05-31/>
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Sheets, K. (2024). *Embroidered memories: Postmemorial nostalgia in Palestinian tatreez*. *Emotions and Society*, 6, 1–20. <https://doi.org/10.1332/26316897Y2024D000000038>
- UN News. (2023, November 3). *UN rights chief deplores civilian suffering in Gaza and Israel, urges ceasefire*. United Nations News.
<https://news.un.org/en/story/2023/11/1143352>
- UN News. (2023). *Security Council deadlocks on ceasefire in Gaza*. United Nations.
- University of Nottingham. (2024). *UoN staff commit to the BDS movement for Palestine*.
<https://uonucu.org/uon-staff-commit-to-the-bds-movement-for-palestinebds-pledge/>
- Who Profits. (2022). *Investigating corporate involvement in Israeli settlements*.
<https://whoprofits.org>
- Who Profits. (2023). *Exposing the Israeli occupation economy*. Who Profits Research Center.